

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dan otonomi daerah merupakan hal yang saling berkaitan dan memegang peran penting dalam kemajuan suatu daerah. Di Indonesia, otonomi daerah telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Pemberian otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan agar pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan yang tepat dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. Dalam proses pembangunan daerah harus didukung dengan pengelolaan sumber keuangan yang tepat (Dandi, D M R, 2023).

Pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan utama setiap daerah di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah pendapatan keuangan yang kuat dan stabil. Pada hakikatnya pembangunan daerah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat daerah. Terciptanya pembangunan daerah yang baik, efektif dan efisien, akan mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, dalam pembangunan daerah dibutuhkan kontribusi masyarakat yang tinggi. Sehingga dengan tingginya kontribusi masyarakat terhadap

pembangunan daerahnya, dapat meningkatkan penerimaan daerah (Iyonu et al., 2023).

Otonomi daerah merupakan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang termasuk pelimpahan tanggung jawab dalam pembiayaan sarana dan prasarana daerah serta sumber daya manusia. Pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengelola keuangannya melalui otonomi daerah, seiring dengan penerimaan pendapatan asli daerah menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang paling utama. Dengan adanya otonomi daerah, dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan menciptakan kemandirian daerah (Oki et al., 2020).

Pemerintah daerah harus secara aktif dan optimal menggali sumber-sumber pendapatan potensial yang terdapat di daerahnya masing-masing. Setiap daerah harus mampu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah diperoleh dari pengelolaan sumber daya daerah yakni pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah. Dengan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup, daerah dapat membiayai berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dibiayai oleh PAD, maka semakin tinggi kualitas otonomi daerah, sehingga daerah semakin mandiri dalam bidang keuangannya (Mulyadi & Nawangsasi, 2020).

Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD memiliki peran yang sangat signifikan dalam menganalisis keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan APBD yang efektif dan transparan menjadi prasyarat penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. Selain itu, APBD juga menjadi cerminan dari kebijakan fiskal dan strategi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya finansial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021 dapat diketahui Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2017 mencapai Rp 2.742.201.536.264,20, meningkat menjadi Rp 2.876.343.695.519,71 pada 2018. Sementara itu, Belanja Daerah pada tahun 2017 adalah Rp 2.116.216.445.466,02 dan meningkat menjadi Rp 2.118.545.900.336,73 pada 2018. Tahun 2019, pendapatan daerah kembali naik menjadi Rp 3.119.200.157.022,91, dengan Belanja Daerah yang juga meningkat sesuai jumlah tersebut. Namun, di tahun 2020, pendapatan daerah mengalami penurunan menjadi Rp 2.939.477.566.194,07, sementara Belanja Daerah justru naik menjadi Rp 2.485.716.405.435,02. Pada tahun 2021, Pendapatan Daerah mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp 3.133.574.194.041,41, dengan kenaikan juga terjadi pada Belanja Daerah yang mencapai Rp 3.192.751.639.289,33.

Dari besarnya APBD dapat diketahui bahwa Kabupaten Gresik memiliki kondisi ekonomi yang semakin berkembang serta memiliki beberapa sektor unggulan dalam mendorong dan memperkuat perekonomian daerah. Sebagai

daerah pesisir Kabupaten Gresik memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti pertanian dan perikanan. Secara ekonomi, Kabupaten Gresik juga sangat berkembang di beberapa sektor unggulan yakni industri, perdagangan, dan jasa. Beberapa perusahaan besar seperti PT. Petrokimia Gresik dan PT. Semen Indonesia serta berdirinya JIPE sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif yang beroperasi di Kabupaten Gresik berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam perekonomian Jawa Timur terdapat tiga sektor utama yang menjadi pendorong perekonomian yakni, sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Kabupaten Gresik menjadi salah satu pusat terbesar dari sektor-sektor tersebut. Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Gresik cukup menjanjikan dan diyakini dapat terus berkembang. Dengan demikian memperkuat posisi Kabupaten Gresik sebagai wilayah strategis yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur.

Berikut adalah data pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang disajikan dalam bentuk diagram.

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah



Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik, 2021

Berdasarkan gambar diagram pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 – Tahun 2021 mengalami fluktuatif. Meskipun memiliki potensi yang besar, pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik sendiri tidak bisa mencapai potensi maksimalnya. Perubahan ekonomi global, situasi ekonomi nasional, serta faktor internal daerah dapat menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi pendapatan asli daerah. Ketidak konsistenan pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik ini tentu akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan daerah, serta dapat mempengaruhi keseimbangan keuangan daerah.

Sebagai wilayah otonom, Kabupaten Gresik memiliki kewajiban untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan utama. Pemerintah daerah Kabupaten Gresik diharapkan mampu mengelola sumber daya daerah dengan baik agar dapat memperoleh pendapatan asli daerah yang cukup untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Gresik mengandalkan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (Simbolon et al., 2022). Pajak daerah menjadi salah satu solusi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Namun, meskipun pajak daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik, realitanya terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Salah satu kendala tersebut yakni fluktuatifnya penerimaan pajak daerah, yang dipengaruhi oleh beberapa

faktor seperti kondisi perekonomian, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, tingkat pengangguran, dan sebagainya.

Gambar 1.2 Pajak Daerah



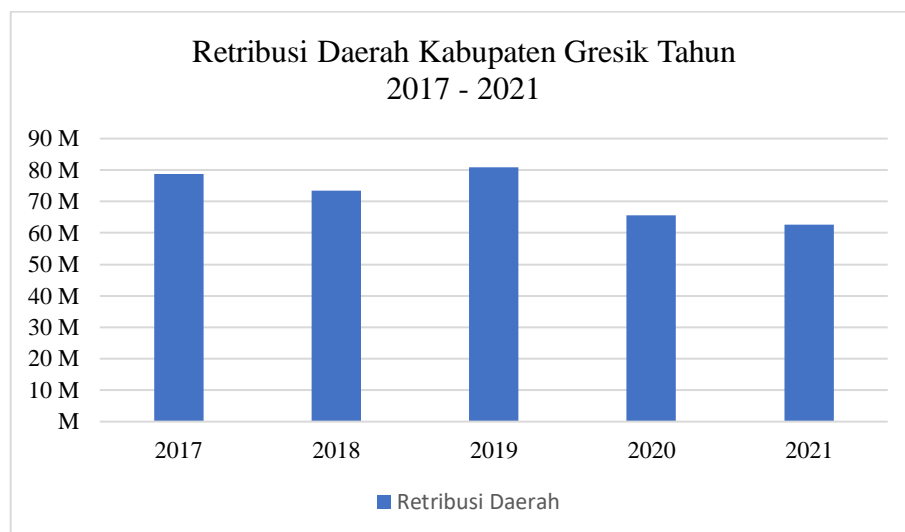
Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik, 2021

Dapat dilihat pada diagram diatas data pajak daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2017 hingga 2019 pajak daerah Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, pada tahun 2020 pajak daerah Kabupaten Gresik mengalami penurunan yang cukup tajam, seiring dengan adanya dampak Covid-19. Tahun 2021 pajak daerah Kabupaten Gresik mengalami kenaikan paling tinggi di lima tahun terakhir.

Fluktuasi pajak daerah tersebut tentu berdampak pada pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik, dimana penurunan pajak daerah dapat mempengaruhi penurunan pendapatan asli daerah (Salsabila, 2022). Oleh karena itu, stabilitas dan konsistensi dalam penerimaan pajak daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan roda pemerintahan dan dapat membiayai berbagai program pembangunan daerah.

Selain pajak daerah, pemerintah Kabupaten Gresik juga mengandalkan sumber pendapatan lainnya, yakni retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan karena mampu memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap penerimaan daerah (Pekuwali et al., 2020). Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup penting dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Gresik. Namun, apabila retribusi daerah sering mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun, dapat berdampak pada permasalahan pendapatan asli daerah.

Gambar 1.3 Retribusi Daerah



Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik, 2021

Dapat dilihat dari diagram di atas retribusi daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2017 hingga tahun 2019 penerimaan retribusi daerah Kabupaten Gresik mengalami fluktuatif. Kemudian, dari tahun 2019 hingga tahun 2021 retribusi daerah Kabupaten Gresik terus mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor seperti tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi, dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi.

Fluktuasi penerimaan retribusi daerah dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan retribusi daerah dengan baik. Pengelolaan retribusi daerah yang optimal mampu mewujudkan otonomi daerah yang baik serta pembangunan daerah yang merata (Pekuwali et al., 2020).

Selain itu, belanja daerah juga menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran belanja daerah tersebut didanai oleh sumber-sumber pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah salah satunya yakni pendapatan asli daerah (PAD). Kegiatan belanja daerah akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan perekonomian. Seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka penerimaan pemerintah melalui pendapatan asli daerah juga meningkat (Ramadhan & Syahidin, 2020).

Gambar 1.4 Belanja Daerah

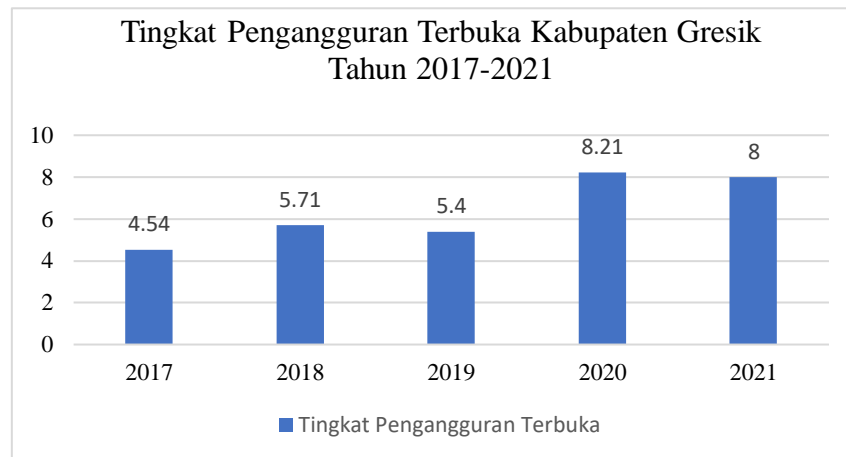


Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik, 2021

Dapat dilihat dari diagraf diatas, belanja daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sangat tinggi dan melebihi pendapatan asli daerah. Peningkatan belanja daerah yang terus menerus tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah, menyebabkan defisit anggaran di Kabupaten Gresik, dan menimbulkan keawatiran mengenai kesehatan keuangan daerah. Dalam melakukan belanja daerah penting memperhatikan besarnya pengeluaran terhadap penerimaan pendapatan. Pengeluaran yang tidak efektif dapat mempengaruhi ketidak seimbangan keuangan daerah dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Selain faktor internal pemerintah daerah, faktor eksternal yang mempengaruhi fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gresik adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut. Secara umum pengangguran merupakan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan (Muliawan & Hasmarini, 2023).

Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2021

Dapat dilihat dari gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan dua tahun berikutnya, sangat terlihat di dua tahun terakhir (th.2020 – th.2021) tingkat pengangguran Kabupaten Gresik sangat tinggi. Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Gresik, tentu dapat menurunkan pendapatan asli daerah karena kurangnya kontribusi dari pendapatan dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Kabupaten Gresik sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Seharusnya potensi tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah yang baik. Namun, fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik masih terdapat beberapa kendala. Berbagai faktor baik internal maupun eksternal sangat mempengaruhi tingkat

pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik, salah satunya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga pajak daerah dan retribusi daerah mengalami fluktuatif, serta permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak optimal, seperti adanya anggaran belanja yang tidak efektif dan efisien, serta kurangnya kontribusi masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Hal tersebut sangat berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan pada uraian tersebut, penting dilakukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah, dan tingkat pengangguran terbuka. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah di Kabupaten Gresik dengan judul **“Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik?
3. Apakah Belanja Daerah berpengaruh Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik?

4. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik, ruang lingkup penelitian ini ditentukan dengan menggunakan beberapa variabel, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel bebas (*independen*) dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat (*dependen*).

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan di gunakan sebagai acuan atau landasan dalam bidang ilmu ekonomi yang terkait dengan Pengaruh Pajak Daerah, Belanja Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik. Serta dapat menambah literatur bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan ataupun sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan strategi dan program pembangunan daerah yang tepat serta saran dalam menetapkan kebijakan berkemajuan untuk meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan tepat khususnya di Kabupaten Gresik.